

**ANALISIS DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI
SUMATERA BARAT**

PROPOSAL PENELITIAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi S1
(Strata Satu) Pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**MUHAMMAD IRWANDA
NIM. 21060161**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

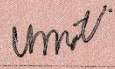
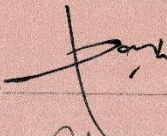
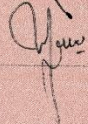
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI SUMATERA BARAT

Nama : Muhammad Irwanda
NIM/TM : 21060161/2021
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2025

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Urmatul Uska Akbar, S.E., M.E.	1. 
2	Anggota	: Dr. Novya Zulva Riani, SE., M.Si.	2. 
3	Anggota	: Mike Triani, SE., MM.	3. 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

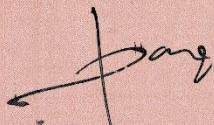
ANALISIS DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PUBLIK
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI SUMATERA BARAT

Nama : Muhammad Irwanda
NIM/TM : 21060161/2021
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

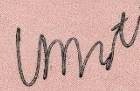
Padang, Agustus 2025

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi,

Disetujui dan Disahkan oleh
Pembimbing,



Dr. Novva Zulva Riani, S.E., M.Si
NIP. 19711164 200501 2 001



Urmatul Uska Akbar, SE., ME.
NIP. 19850705 201903 2 013

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irwanda
NIM/Tahun Masuk : 21060161/2021
Tempat, Tanggal Lahir : Palangki, 5 Januari 2003
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jorong Tanjung Udani, Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten
Sijunjung, Sumatera Barat
No.HP/Telepon : 081378259975
Judul Skripsi : Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Kepala Departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2025

takan,

Muhammad Irwanda
NIM: 21060161

ABSTRAK

Muhammad Irwanda (21060161): Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Sumatera Barat. Skripsi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Dibawah Bimbingan Ibuk Urmatul Uska Akbar, S.E, M.E

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017–2023. Variabel independen yang diteliti meliputi pengeluaran sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta tingkat pengangguran terbuka, sedangkan variabel dependen adalah Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI).

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model, setelah melalui serangkaian uji pemilihan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran sektor pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPEI, sedangkan pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sebaliknya, pengeluaran sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPEI, sementara tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, meskipun koefisien determinasi (R^2) hanya sebesar 11,21%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor lain di luar model yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat. Temuan ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja sebagai kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

keywords: pengeluaran pemerintah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi inklusif.

ABSTRACT

Muhammad Irwanda (21060161): Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Sumatera Barat. Skripsi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Dibawah Bimbingan Ibuk Urmatul Uska Akbar, S.E, M.E

This study aims to analyze the effect of public sector government expenditure on inclusive economic growth in West Sumatra Province during the period 2017–2023. The independent variables include government spending on education, health, infrastructure, and the open unemployment rate, while the dependent variable is the Inclusive Economic Growth Index (IPEI).

The analytical method employed is panel data regression using the Common Effect Model, determined through model selection tests. The results reveal that education spending has a positive but insignificant effect on IPEI, while health spending has a negative and insignificant effect. In contrast, infrastructure spending shows a positive and significant effect, whereas the open unemployment rate has a negative and significant effect on IPEI. Simultaneously, all four variables significantly influence inclusive economic growth, although the coefficient of determination (R^2) is only 11.21%, indicating that many other factors outside the model affect inclusive growth in West Sumatra. These findings highlight the crucial role of infrastructure development and job creation as key drivers of equitable and inclusive economic growth.

Keywords: government expenditure, education, health, infrastructure, open unemployment, inclusive economic growth.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, serta atas izin dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Sumatera Barat**" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

Dalam proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan dan bantuan serta saran dari berbagai pihak yang diperoleh penulis dapat mempermudah dalam proses pembelajaran ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa dan terhormat kepada papa dan mama, saudara dan saudari tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga serta do'a yang tak henti dilangitkan, dukungan, semangat, motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibuk Dr. Novya Zulva Riani, SE., M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Ibuk Urmatul Uska Akbar, S.E, M.E selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran-saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibuk Dr. Novya Zulva Riani, SE., M.Si selaku Dosen Penguji 1 yang telah memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis yang membangun guna menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.
6. Ibuk Mike Triani, SE., MM. selaku Dosen Penguji 2 yang juga memberikan saran-saran yang membangun bagi penulis sehingga tercipta skripsi yang lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya pada Program Studi Ilmu Ekonomi beserta seluruh karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi.
8. Kakak Asma Lidya, Amd selaku Admin Departemen Ilmu Ekonomi yang telah membantu penulis dalam berbagai hal pengurusan administrasi.
9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Terimakasih kepada Miftahul Jannah yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada disamping penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

11. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat terbaik saya (Reza, Fathan, Ziko, Rizky, Rio, Rasyad, dan Fiqri) yang selalu hadir memberi semangat, tawa, serta dukungan moril di setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dan motivasi yang tak ternilai harganya. Kehadiran kalian telah menjadi penyemangat tersendiri dalam menghadapi setiap tantangan selama masa studi ini.
12. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis, khususnya teman-teman seperjuangan dari prodi Ilmu Ekonomi Angkatan 2021.
13. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dalam kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Oktober 2025
Penulis

Muhammad Irwanda
NIM. 21060161

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Konseptual	24
D. Hipotesis Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Definisi Operasional Variabel	30
F. Teknik Analisis Data	32
1. Analisis Deskriptif	32
2. Analisis Induktif	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 IPEI Sumatera Barat 2017-2023.....	3
Grafik 4. 1 Uji Normalitas	53
Grafik 4. 2 Uji Heterokedastisitas	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	31
Tabel 4. 1 Data Realisasi Anggaran Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2023	43
Tabel 4. 2 Data Realisasi Anggaran Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2023	45
Tabel 4. 3 Data Realisasi Anggaran Infrastruktur Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2023	47
Tabel 4. 4 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2023	49
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow.....	51
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman	52
Tabel 4. 8 Uji Multikolineritas.....	54
Tabel 4. 9 Uji VIF	54
Tabel 4. 10 Uji Regresi Data Panel.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	25
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

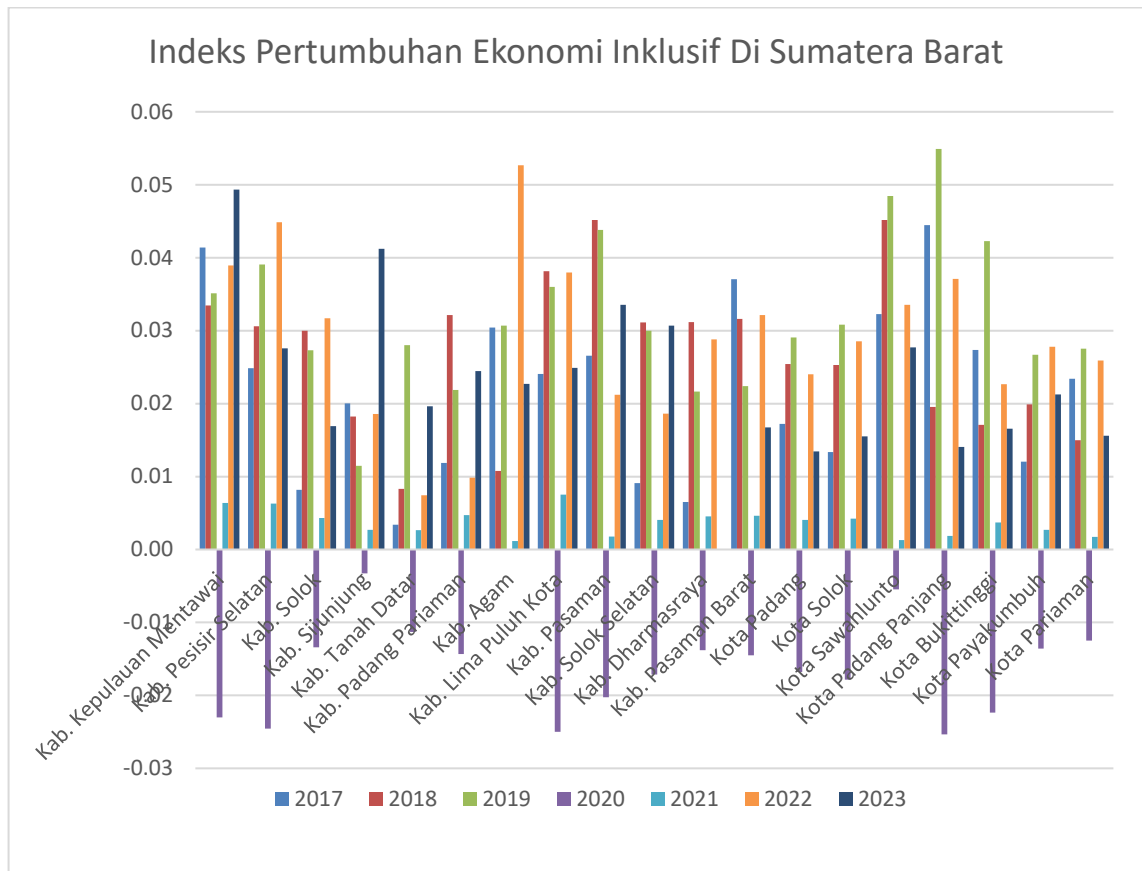
Desentralisasi fiskal merupakan proses di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta merencanakan perekonomian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki otoritas dalam pengalokasian anggaran, termasuk belanja pemerintah, guna memastikan bahwa program pembangunan ekonomi yang telah dirancang dapat terealisasi dengan baik. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan secara optimal dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya berfokus pada peningkatan output semata, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Safitri *et al.*, 2021).

Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan per kapita, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih adil, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan keuangan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi salah satu

tujuan utama pembangunan di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, konsep ekonomi inklusif menjadi penting, karena tidak hanya berfokus pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan peluang ekonomi.

Salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif adalah peran pemerintah melalui pengeluaran di sektor publik. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas. Belanja pemerintah di sektor pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses dan mutu pendidikan yang lebih baik. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan, produktivitas ekonomi akan meningkat. Sementara itu, belanja di sektor kesehatan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.



Sumber: BPS, IPEI Sumatera Barat 2017-2023, Data Diolah

Grafik 1. 1 IPEI Sumatera Barat 2017-2023

Grafik di atas menggambarkan perkembangan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Sumatera Barat pada tingkat kabupaten/kota dari tahun 2017 hingga 2023. Secara umum, indeks ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi di suatu daerah mampu menciptakan pemerataan dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar daerah mengalami fluktuasi nilai indeks dari tahun ke tahun. Tahun 2020 menjadi titik terendah di hampir seluruh wilayah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi dan memperlebar ketimpangan sosial.

Setelah tahun 2020, terlihat adanya tren pemulihan secara bertahap, terutama pada tahun 2022 dan 2023, di mana banyak kabupaten/kota mulai kembali mencatatkan nilai indeks yang lebih tinggi. Beberapa daerah seperti Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi secara konsisten menunjukkan indeks yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tidak hanya meningkat, tetapi juga bersifat inklusif dan merata. Sebaliknya, daerah seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman Barat terlihat memiliki indeks yang rendah bahkan negatif pada beberapa tahun, yang mengisyaratkan adanya tantangan serius dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif.

Perbedaan antarwilayah ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara merata. Beberapa daerah mungkin memiliki pertumbuhan ekonomi, namun belum mampu memastikan bahwa hasilnya bisa dirasakan oleh semua kelompok masyarakat. Oleh karena itu, hasil indeks ini penting sebagai alat evaluasi dan perencanaan kebijakan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di masa depan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor struktural dan sosial yang menghambat inklusivitas agar pertumbuhan ekonomi dapat membawa manfaat bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali.

Sumatera Barat dipilih sebagai objek penelitian untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif karena beberapa alasan utama. Salah satu faktor yang mendasarinya adalah adanya kesenjangan

pembangunan antara daerah perkotaan seperti Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh dengan daerah pedesaan dan kepulauan seperti Kepulauan Mentawai. Ketidakseimbangan ini menjadikan Sumatera Barat sebagai wilayah yang relevan untuk dikaji guna memahami sejauh mana belanja pemerintah di sektor-sektor tersebut mampu mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Selain itu, provinsi ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan ekonomi inklusif. Investasi pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan sangat krusial karena berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Namun, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih belum merata, terutama di daerah terpencil dan pedalaman. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas pengeluaran publik di sektor ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang strategi terbaik untuk meningkatkan pemerataan ekonomi melalui penguatan kualitas SDM.

Di sisi lain, infrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sumatera Barat. Topografi wilayah yang beragam, mulai dari pegunungan hingga kepulauan, membutuhkan investasi besar dalam pembangunan jalan, jembatan, serta sarana transportasi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Alokasi anggaran di sektor ini dapat membuka akses masyarakat ke pasar, layanan kesehatan, serta pendidikan, yang berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan ekonomi.

Selain sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur salah satu aspek penting

yang turut menentukan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka mencerminkan proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan namun sedang aktif mencari kerja. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tingginya angka pengangguran menjadi indikator bahwa tidak semua kelompok masyarakat mendapatkan akses terhadap kesempatan ekonomi yang tersedia.

Pengangguran yang tinggi berimplikasi pada ketimpangan distribusi pendapatan dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat menghambat pemerataan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sehingga menurunkan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam jangka panjang, pengangguran yang tidak ditangani dengan baik juga dapat memperparah ketimpangan sosial dan menciptakan beban fiskal tambahan bagi pemerintah melalui program bantuan sosial dan subsidi.

Di Provinsi Sumatera Barat, disparitas antarwilayah dan keterbatasan lapangan kerja formal menyebabkan angka pengangguran terbuka di beberapa daerah relatif tinggi. Meskipun sektor pendidikan dan pelatihan vokasi telah dikembangkan, belum semua lulusan terserap oleh pasar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja yang inklusif belum optimal. Oleh karena itu, memasukkan variabel tingkat pengangguran terbuka dalam analisis ini menjadi relevan dan penting untuk memahami bagaimana kondisi pasar tenaga kerja memengaruhi arah pertumbuhan ekonomi yang merata dan adil.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Sumatera Barat menjadi lokasi yang strategis untuk meneliti bagaimana pengeluaran pemerintah di sektor

publik dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran secara optimal untuk mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pengeluaran pemerintah di sektor publik memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui alokasi anggaran pada sektor-sektor seperti pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, dan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Di Indonesia, berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebuah studi oleh Anggraeni (2017) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam jangka panjang maupun pendek. Penelitian ini menekankan pentingnya investasi pemerintah dalam sektor-sektor tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, penelitian lain oleh Wahyudi (2020) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebaliknya, pengeluaran untuk infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah dapat

berbeda berdasarkan sektor dan wilayah yang dianalisis.

Di Sumatera Barat, penelitian oleh Riani & Nelvia Iryani (2023) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pembentukan modal tetap bruto terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Meskipun penelitian ini masih dalam tahap awal, hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Selain itu, studi oleh Anggraeni (2017) menekankan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan kesehatan secara simultan berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia dalam jangka panjang maupun pendek. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah di sektor-sektor tersebut dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya memiliki peran krusial dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi ke berbagai sektor ekonomi. Sementara itu, belanja di sektor transportasi membantu memperbaiki konektivitas antarwilayah, membuka akses bagi masyarakat ke berbagai peluang ekonomi, serta meningkatkan efisiensi distribusi hasil produksi.

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor tersebut, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Ketimpangan dalam alokasi anggaran antarwilayah, efektivitas penggunaan dana, serta dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi isu yang perlu diperhatikan. Beberapa daerah mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, tetapi belum tentu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris untuk menilai sejauh mana belanja pemerintah di sektor-sektor tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat. Dengan memahami hubungan antara kedua variabel ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, muka permasalahan yang ingin diteliti yaitu:

1. Sejauh mana pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat?
2. Sejauh mana pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat?
3. Sejauh mana pengaruh belanja pemerintah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat?
4. Sejauh mana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat?

5. Sejauh mana pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama sama terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis dampak tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat.
5. Untuk menganalisis dampak belanja pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama sama terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur mengenai kajian desentralisasi fiskal dan peran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.
- b. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai efektivitas pengeluaran sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan tingkat

pengangguran terbuka terhadap peningkatan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan dalam menganalisis pengaruh belanja sektor publik terhadap aspek lain seperti ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, khususnya mahasiswa/i Jurusan Ilmu Ekonomi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan acuan bagi mahasiswa serta referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat periode 2017–2023, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengeluaran sektor pendidikan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah.
2. Pengeluaran sektor kesehatan menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPEI. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja di sektor kesehatan selama periode pengamatan belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
3. Pengeluaran sektor infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPEI. Artinya, belanja pemerintah pada sektor ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, terutama melalui peningkatan konektivitas, efisiensi ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar.
4. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPEI. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran di suatu daerah, semakin rendah pula tingkat pertumbuhan

ekonomi inklusif yang tercapai. Dengan kata lain, penciptaan lapangan kerja menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

5. Secara simultan, keempat variabel yaitu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap IPEI. Namun demikian, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 11,21% menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas dan pemerataan dalam realisasi anggaran pendidikan dan kesehatan, terutama dengan memastikan bahwa belanja publik benar-benar menjangkau kelompok masyarakat miskin, rentan, dan wilayah tertinggal.
2. Penguatan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah, karena terbukti memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Fokus perlu diberikan pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang meningkatkan konektivitas antarwilayah.
3. Penurunan angka pengangguran perlu menjadi perhatian utama, melalui pengembangan program pelatihan kerja, peningkatan akses terhadap lapangan kerja formal, dan dukungan terhadap kewirausahaan serta

UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.

4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti investasi swasta, indeks kualitas layanan publik, atau inklusi keuangan yang juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif bisa memperkaya pemahaman terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Ngurah Gede, W. (2022). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 262–275. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.262-275>
- Aimon, H., Kurniadi, A. P., & Satrio, M. K. (2020). Analysis of Inclusive Growth in Poverty, Unemployment and Income Inequality in West Sumatera Province: Panel Error Correction Model Approach. *Jurnal Benefita*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4901>
- Agustina, M., Astuti, H., & Susilo, J. H. (2023). Unemployment in Indonesia: An Analysis of Economic Determinants from 2012-2021. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1), 69–82. <https://doi.org/10.15408/sjie.v12i1.29247>
- Agnes Vera Yanti Sitorus, & Arsani, A. M. (2018). A Comparative Study of Inter-Provincial Inclusive Economic Growth in Indonesia 2010-2015 with Approach Methods of ADB, WEF, and UNDP. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1), 64–77. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.32>
- Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring inclusive growth. *Asian Development Review*, 24(1), 11–31. <https://doi.org/10.1142/s0116110507000024>
- Afriyana, L. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v5i1.70>
- Anggraeni, M. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonom*, 6(3), 499–509.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2017-2023.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif 2017-2023
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *PT Rajagrafindo Persada*, 1–239.
- Dewi Purwanti, S., & Rahmawati, F. (2021). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia*. 4(1).

Fauza, R. A. (2024). *Pengembangan Multimedia Interaktif Raden Intan Lampung 1445 H / 2024 M*.

Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics. In *The Economic Journal*. <https://doi.org/10.2307/2230043>

Guampe, F. A., Walenta, A. S., & Kawani, F. B. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2001-2021. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 6(1), 92–102. <https://doi.org/10.29408/jpek.v6i1.5536>

Handayani, W., Karimi, K., Pembangunan, P. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). *ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, KEMISKINAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF INDONESIA TAHUN 2015-2021*.

Hasanah, A., Hariyani, F., Pasiriani, N., & Murti, N. N. (2023). Central publisher. *Central Publisher*, 1, 274–288.

Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, & Wiwiek Rindayati. (2020). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898>

Hidayat, I., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). The Determinants of Inclusive Economic Growth in Yogyakarta. *Jurnal Economia*, 16(2), 200–210. <https://doi.org/10.21831/economia.v16i2.29342>

Ichdar, A. N. (2022). *Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah fungsi Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Timur* A Nurfadhilah Ichdar, S.Ip, Ardyanto Fitrady,MA.,Ph.D. 484741.

Kementerian Keuangan, Realisasi Belanja Per Fungsi Tahun 2017-2023

Klasen, S. (2010). Measuring and monitoring inclusive growth in developing and advanced economies: Multiple definitions, open questions and some constructive proposals. *Reframing Global Social Policy: Social Investment for Sustainable and Inclusive Growth*, (12), 123–144. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447332497.003.0006>

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. <https://doi.org/10.1016/0304->

3932(88)90168-7

- Mega, P. (2023). Penerapan Model Vector Error Correction Model (VECM) Pada Peramalan Data Nilai Ekspor Dan Nilai Impor Seluruh Komoditas Di Provinsi Lampung Tahun 2022.
- Prabowo, D. H., Maski, G., & Santoso, D. B. (2023). Public Spending and Financial Inclusion and Their Impact on Inclusive Growth In Indonesia: A Spatial Approach. *Media Trend*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v18i1.14747>
- PRATAMA, A. R. (n.d.). *ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2014-2018*.
- PRIMAWAN, M. I. (2019). ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.3386/w3210>
- Riani, I. N., & Nelvia Iryani. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 195–205. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.702>
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). *INDONESIAN TREASURY REVIEW ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF JAWA TIMUR Ferry Prasetyia*.
- Saputra, D. D., & Sukmawati, A. (2021, November). Pendekatan analisis vector error corretion model (VECM) dalam hubungan pertumbuhan ekonomi Dan sektor pariwisata. In *Seminar Nasional Official Statistics (Vol. 2021, No. 1, pp. 120-129)*.
- Silahul, & Misbahol. (2024). Identifikasi Peran Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Inklusif: Studi Empiris dari Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Archipelago*, 03(1), 55–67.
- Sri Hartati, Y. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia.

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(1), 79–92.
<https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>

Sukirno, S. (2013). *MAKROEKONOMI: TEORI PENGANTAR (Ketiga)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutrisno, D. R. I., & Hukom, A. (2023). Implementasi Faktor-Faktor Pendorong Program Sustainable Development Poin Ke-8 Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(3), 529–538.
<https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i3.382>

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga (terjemahan)*. Penerbit Erlangga: Jakarta.

UNDP. (2017). *United Nations Development Program (UNDPs) Strategy for Inclusive and Sustainable Growth*. 1–147.
[http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty Reduction/UNDPs Inclusive and Sustainable Growth-final.pdf?download](http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/UNDPs%20Inclusive%20and%20Sustainable%20Growth-final.pdf?download)

Wafit Hidayah, & Happy Febrina Hariyani. (2024). The Role Of Education For Economic Growth In Indonesia. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(1), 246–258. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i1.5185>

Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 103–113.

Wahyuningrum, P. S., & Juliprijanto, W. (n.d.). *PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA*.
<https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>

Wang, F. (2015). More health expenditure, better economic performance? Empirical evidence from OECD countries. *Inquiry (United States)*, 52(1), 3–7. <https://doi.org/10.1177/0046958015602666>

Widyastuti, E., & Arinta, Y. N. (2020). Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Bagaimana Kontribusinya?. *Al-Muzara'ah*, 8(2), 129–140.

World Bank. (2014). *Indonesia: Menghindari Perangkap. Kajian Kebijakan Pembangunan 2014*.